



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AHMAD SAIFUDDIN**
2. Jabatan : **LURAH**
3. NHK : **881044**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.980.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 41 m2/41 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/29 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/96 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/96 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 211.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU TERIOS X M/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 188.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.300.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.194.300.000
III. HUTANG	Rp.	958.055.732
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.236.244.268

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.